

**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
RENCANA KERJA (RENJA) 2024**



**MAJELIS ADAT ACEH
KABUPATEN PIDIE
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja MPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPK.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	13
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPK	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	21
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	21
3.3 Program dan Kegiatan	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	31
BAB V PENUTUP	35

DAFTAR TABEL

Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2020	7
Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Majelis Adat Aceh kabupaten Pidie	11
Tabel TC-32 Usulan Program Dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023.	16
Tabel Remusyawancana kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie Tahun 2023.	22

Lampiran :

Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPK Tahun 2023 ...	
Tabel TC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu tahapan penyusunan kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan semua stakeholders, guna optimalisasi pengalokasian sumberdaya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam periode dan jangka waktu tertentu.

Proses perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 86 tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diimplimentasikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten menyusun Rencana Kerja (Renja SKPK).

Renja disusun setiap awal tahun untuk perencanaan tahun berikutnya dengan mendapatkan usulan kegiatan, sub kegiatan dan bidang teknis. Usulan juga memungkinkan dari masyarakat, yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie. Sub Bagian Program dan Perencanaan merangkum usulan tersebut dan selanjutnya dibahas bersama bidang teknis untuk kesempurnaan Renja.

Selanjutnya Renja menyesuaikan dengan RKPK (Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Hal ini untuk menjaga konsistensi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten, prioritas RKPK dan anggaran yang tersedia. Dengan penyesuaian ini akan menciptakan sinkronisasi dan integrasi dalam pencapaian target dan prioritas pembangunan Kabupaten Pidie.

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Kabupaten dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran organisasi perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen pelaksanaan anggaran melalui penetapan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kinerja MAA yang dijadikan acuan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
- 1.2.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- 1.2.3 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 1.2.4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

- 1.2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008.Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5887).
- 1.2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056.
- 1.2.7 Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- 1.2.8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1.2.9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 1.2.10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 1.2.11 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- 1.2.12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
- 1.2.13 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh;

- 1.2.14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 1.2.15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 1.2.16 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 1.2.17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tatacara perihal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312
- 1.2.18 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah
- 1.2.19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050_5889_Tahun 2021 Tentang kodefikasi dan nomerklatur Daerah.
- 1.2.20 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 1.2.21 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03 tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 tahun 2011 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Pidie;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja MAA Kabupaten Pidie tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja SKPK pada MAA Kabupaten Pidie adalah untuk menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional, memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan, mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan serta menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan penyajian sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I, PENDAHULUAN

Terdiri atas Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan dalam penyusunan Renja MAA

BAB II, HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Terdiri dari Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja MAA dan Capaian Renstra SKPK, Analisis Kinerja Pelayanan MAA, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi MAA, Review terhadap Rancangan Awal RKPK dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III, TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

Terdiri dari Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja MAA serta Program dan Kegiatan

BAB IV, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Terdiri dari Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah

BAB V, PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA MAA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPK

Perencanaan Kinerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie Tahun 2024 telah disusun berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan prioritas-prioritas kegiatan sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sesuai perencanaan yang telah disusun tahun 2022.

Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie pada tahun 2022 sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya terdapat 2 (dua) jenis program yang terbagi dalam beberapa kegiatan, telah dilaksanakan sampai dengan 30 Desember 2022 dengan capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan mencapai 84,61 persen.

Evaluasi kinerja Program Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie tahun 2024 secara detail per program kegiatan sampai dengan 30 Desember 2022 dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dengan anggaran sebesar Rp.0,-Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-
Capaian kinerja yang diharapkan :
 - Tersedianya dokumen Rencana Kerja
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,

- Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2) Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan Administrasi Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 790.383.750,- Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 790.383.750,- atau 100 persen.

Capaian kinerja yang diharapkan :

- Tersedianya gaji dan tunjangan ASN

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 407.491.572,- Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 407.491.572,- atau 100 persen yang meliputi :

d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 407.491.572,- Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 407.491.572,- atau 100 persen

Capaian kinerja yang diharapkan :

- Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor
- Tersedianya jasa administrasi keuangan
- Tersedianya jasa kebersihan kantor
- Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja
- Tersedianya alat tulis kantor
- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

e. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- atau 100 persen

Capaian kinerja yang diharapkan :

- Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

- f. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 55.720.000,-Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 77.795.200,-atau100persen

Capaian kinerja yang diharapkan :

- Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
2. Program Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan : Dan tidak terealisasi karena Wabah Covid-19.

Dari tabel terlihat bahwa usulan program dan kegiatan sebagaimana telah diajukan dalam dokumen perencanaan MAA tahun 2020 tidak sepenuhnya dapat terakomodir, namun program maupun kegiatan yang dapat tertampung dalam anggaran belanja hampir mencapai 100% tingkat realisasinya, ini menandakan bahwa MAA dengan maksimal menggunakan kesempatan menjalankan setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Merespon tuntutan perkembangan dan keterbatasan anggaran pada MAA dari tahun ke tahun, perencanaan strategis MAA Tahun 2017 s.d 2022 juga telah mengalami perubahan. Hal ini menyebabkan indikator kinerja dan indikator kegiatan yang disusun secara tahunan tidak selaras dengan perencanaan jangka menengah. Parameter kegiatan sulit diukur karena adanya perubahan rencana program dan kegiatan yang kemudian muncul pada tahun 2020 dan tidak dapat mengacu lagi kepada rencana strategis yang disusun sebelumnya. Sedangkan Pada tahun 2020 semua kegiatan MAA tidak terealisasi dampak dari masa lock down karena wabah Covid-19..

Walaupun perencanaan jangka menengah MAA telah mengalami perubahan, akan tetapi tetap dilakukan semata-mata untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian juga untuk capaian rencana strategis secara umum tetap sesuai dengan target rencana kinerja tahunan.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara umum analisis kinerja pelayanan Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie, target yang ditetapkan dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan secara tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, telah dilaksanakan secara optimal. Tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan indikator capaian kinerja yang telah diperoleh terlihat dari jumlah alokasi dana dan realisasi anggaran setiap tahunnya, dapat diserap sesuai target yang ditetapkan secara penuh.

Dengan segala keterbatasan MAA Kabupaten Pidie berhasil melaksanakan beberapa kegiatan yang telah direncanakan dan mampu mencapai target program-program dan kegiatan.

Pada tahun 2021 Majelis Adat Aceh telah melakukan beberapa program dan kegiatan dengan Capaian Indikator sebagai berikut :

1. Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan program rutin yang terdapat pada MAA yang capaian indikator mencapai 100%
2. Capaian Sekretariat Majelis Adat Aceh Kab. Pidie
Program Sekretariat MAA Kabupaten Pidie kegiatan pokok terkait dengan fungsi Majelis Adat Aceh yang capaian indikator mencapai 0%

Analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada lampiran tabel TC-2.2

Tabel TC-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Majelis Adat Aceh
Kabupaten Pidie

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran			20	20	20	20	20	20	20	20	
2	Persentase terpenuhinya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur			20	20	20	20	20	20	20	20	
3	Persentase meningkatnya disiplin aparatur			20	20	20	20	20	20	20	20	
4	Persentase Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur			20	10	10	10	10	10	10	10	
5	Persentase tersedianya dokumen capaian kinerja dan keuangan			20	20	20	20	20	20	20	20	
6	Persentase tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah			20	20	20	20	20	20	20	20	
7	Persentase meningkatnya sumberdaya dan peran MAA			10	10	10	10	20	20	20	20	

Penjelasan tabel TC-2.2

adalah sebagai berikut :

- Pada kolom 5 sampai dengan kolom 8 adalah target renstra perangkat daerah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.
- Kolom 9 dan 10 merupakan realisasi capaian target pada tahun 2021 dan 2022, pada tahun 2021 program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen pelaksanaan anggaran semuanya dapat dilaksanakan dengan baik.
- Kolom 11 dan 12 merupakan proyeksi capaian target program dan kegiatan untuk tahun 2023 dan 2024

2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pendidikan Pidie yang memiliki berbagai kompleksitas permasalahan. Pemerintah terus berusaha untuk dapat memberikan pelayanan maksimal kepada warga Kabupaten. Salah satu lembaga yang ikut berperan dalam menentukan kebijakan Kabupaten adalah MAA Kabupaten Pidie. MAA Kabupaten Pidie memberikan masukan, nasehat, saran-saran dalam penentuan Kebijakan daerah dari aspek pendidikan, untuk peningkatan Pendidikan di Kabupaten Pidie.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kerja Sekretariat MAA Pidie untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi keberlangsungan pelayanan di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar Atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh

rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMK) Pidie Tahun 2017- 2022, dampak yang ditimbulkannya terhadap publik;
4. Memiliki daya untuk pembangunan Kabupaten;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan Isu-isu Strategis yang mengemuka, maka diperoleh beberapa isu strategis sebagai hasil dari penilaian, yang diperkirakan memberi manfaat dan pengaruh dalam kurun waktu 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan kualitas SDM dan peranserta MAA dalam pembangunan Pendidikan berbasis Islami.
4. Peningkatan Pelatihan dan Bimbingan bagi para Komite dalam melakukan Pengawasan terhadap Sekolah-sekolah dan pemahamannya mengenai penetapan/ Pembahasan kurikulum.

Untuk dapat merumuskan rencana strategis diperlukan pertimbangan dan Analisa atas potensi-potensi yang terdapat dan dihadapi oleh Sekretariat Kabupaten maupun pemerintahan secara umum. Pertimbangan dan Analisa dimaksud secara sederhana dapat dilakukan dengan pendekatan SWAT. Metode SWAT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, melalui inventarisasi faktor-faktor yang mempengaruhi.

1. Tantangan

- a. Kesulitan dalam bekerja. Memberikan pelayanan akibat dari ruangan sempit
- b. Penyebaran dan kompetensi pegawai di biro-biro yang tidak merata.
- c. Belum optimalnya sistem informasi pelaporan
- d. Tuntutan yang tinggi dari masyarakat akan kualitas dan pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- e. Belum maksimalnya kualitas koordinasi serta data dan informasi
- f. Belum maksimalnya koordinasi dan kesepahaman antar Komite dengan Pihak Sekolah
- g. Belum optimalnya dukungan dari SKPK dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan
- h. Adanya Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar Sub Bidang dalam kerja internal
- i. Tuntutan yang semakin besar akan pengentasan ketertinggalan Pendidikan di Kabupaten Pidie dengan dicanangkannya Rencana Pengajian al-quran di sekolah-sekolah.
- j. Adanya anggapan pemangku kepentingan bahwa proses pelaksanaan perencanaan belum optimal dan transparan
- k. Belum terintegrasinya data dasar perencanaan pembangunan.

2. Peluang

- a. Lembaga MAA yaitu sebuah Lembaga Keistimewaan.
- b. Reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Pidie yang mengarah kepada efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.
- c. Tugas dan fungsi MAA Pidie yang cukup luas, meliputi Pengawasan bagi setiap Lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Pidie
- d. Kerjasama internal Sekretariat MAA dan para Anggota MAA cukup baik,

- e. Dukungan tenaga-tenaga Profesional dalam bidang pendidikan di MAA berlatar belakang dari berbagai disiplin ilmu.
- f. Peran Kepala Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pemerintahan dan pemecahan masalah-masalah strategis yang berkaitan dengan pendidikan dan pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Pidie.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPK

Sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie yang telah ditetapkan dengan tujuan utamanya adalah mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten. Sesuai arah dan prioritas pembangunan jangka menengah 2017-2022.

Untuk mencapai hasil yang telah direncanakan berbagai proses pengumpulan masukan berbagai program dan kegiatan yang telah disepakati dari Pra Musrenbang hingga Musrenbang Kabupaten telah disepakati, hal ini dilakukan untuk dapat tertampung dalam rencana kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie dan apabila didukung dengan anggaran yang mencukupi maka akan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun untuk Tahun 2024 telah terkumpul beberapa program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie yang semuanya itu terlampir pada Tabel TC-31.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Rencana Kerja Majelis Adat Aceh didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD. Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada MAA selaku organisasi perangkat daerah baik dari kelompok masyarakat maupun LSM serta pemangku kepentingan lainnya.

Tabel TC-32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Pidie

Nama Perangkat Daerah : Majelis Adat Aceh

No	Program/Kegiatan	Lo kas i	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penyelenggaraan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie	Ling kup Kab. Pidie			
1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh				
1.2	Serap Aspirasi Masyarakat (Meudrah) Wilayah Kabupaten Pidie (Barat, Utara, Selatan)		Terlaksananya Pembekalan kepada masyarakat dalam pengembangan Pendidikan.	5 Kegiatan	
1.2	Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas MAA		Terlaksananya Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas MAA	1 Kegiatan	
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pidie				
	Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan Kepada dan Tenaga Kependidikan pada Setiap satuan Pendidikan		Terlaksananya Kegiatan Penilaian dan Penghargaan Kinerja Komite sekolah dan tenaga Kependidikan	3 Kegiatan	
	Penyelenggaraan Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pendidikan Kabupaten Pidie		Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Dayah Untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	3 Kegiatan	

Program dan kegiatan yang diajukan oleh para Majelis, maka dari itu Majelis Adat Aceh berfokus pada program dan kegiatan rutin yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan yang terdapat pada dokumen Renstra perangkat daerah tahun 2017-2022.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tema pembangunan nasional yang direncanakan akan ditetapkan dalam RKP tahun 2022 adalah "Meningkatkan industri pariwisata dan investasi di berbagai wilayah didukung oleh SDM dan infrastruktur untuk pertumbuhan berkualitas" yang dijabarkan menjadi 5 Proiritas Nasional ditahun 2022 :

1. Pembangunan Manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Prioritas pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Visi Kabupaten Pidie yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Pidie yaitu : "Pidie Meusigrak, Tertib dan Melayani Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berakhlak Mulia"

Mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih menjadi panduan dalam menyusun RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2017-2022 yang selanjutnya dijabarkan dalam Misi dan Program Prioritas.

Adapun Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Nilai-nilai Keislaman, kemuliaan akhlak dan Kearifan lokal (DINUL ISLAM DAN NILAI-NILAI KEARIFAN KEACEHAN).
2. Reformasi birokrasi dan pemerintahan yang baik, tertib, melayani, berkualitas, bersih dan berwibawa (BIROKRASI DAN PEMERINTAHAN)
3. Meningkatkan kualitas masyarakat yang berdaya saing global (PENDIDIKAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA).
4. Meningkatkan kualitas hidup, derajat kesehatan dan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan (KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL).
5. Mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan (PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN).

6. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, industri dan potensi wisata yang kreatif dan kompetitif (EKONOMI, INDUSTRI DAN PARIWISATA).
7. Mewujudkan Penataankota, pengembangan wilayah, infrastruktur dan aksesibilitas daerah yang berkualitas dan terintegrasi (PEMBANGUNAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR).
8. Meningkatkan Pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan lestari yang berkelanjutan dan penanggulangan bencana (SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN).
9. Maka dapat dilihat bahwa dengan tugas dan fungsi yang ada, MAA Kabupaten Pidie sangat mampu mengakomodir program kerja yang terdapat pada misi KeTiga yaitu Meningkatkan kualitas masyarakat yang berdaya saing global (PENDIDIKAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA).

Yaitu dengan upaya meningkatkan Mutu Pendidikan agar dapat bersaing bebas. Dan mendidik untuk memperkuat jati diri dan karakter masyarakat melalui pendidikan Agama Islam yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Allah dan berakhlak mulia.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi tersebut, maka Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Pidie memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sistim Pendidikan Berbasis Islami	Terlaksananya kerjasama, bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan pendidikan berbasis Islam	Terwujudnya anak yang beriman, bertaqwa berprestasi berpendidikan berakhlakul karimah
2	Menigkatkan mutu pendidikan	Meningkatkan mutu pendidikan agar dapat bersaing bebas di masa globalisasi	Terwujudnya jiwa yang berkualitas, berintelektual dan berwibawa
3	Menngkat kan standar Pendidikan	Memperkuat jati diri anak bangsa agar bisa bersaing dengan sportif pada masa daya saing bebas	Terbentuk anak yang berkarakter

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan program dan kegiatan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah Terpilih yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan kepada MAA Kabupaten Pidie. Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk

program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang terdapat pada tabel TC-33 yaitu:

Penjelasan pada tabel TC- 33 yang merupakan rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Majelis Adat Aceh kabupaten Pidie pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Kolom 1 adalah kode program/kegiatan yang akan dilaksanakan
- Kolom 2 adalah urusan/bidang urusan pemerintah daerah yang meliputi nama program dan kegiatan yang terdapat pada rencana kerja MAA
- Kolom 3 adalah program dan kegiatan yang digunakan untuk mencapai hasil yang maksimal
- Kolom 4 adalah indikator program lokasi dilaksanakannya program dan kegiatan yang ada pada tahun 2024
- Kolom 5 adalah target capaian yang akan dicapai terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
- Kolom 16 adalah prakiraan maju rencana kinerja tahun 2024 yang berisikan target capaian kinerja dan kebutuhan dana pada tahun yang akan datang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasikan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai visi dan misi jangka menengah daerah. Dengan Rancangan Awal Rencana Kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan untuk mencapai upaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah.

Penyusunan Renja berpedoman pada Renja Majelis Adat Aceh dan mengacu kepada Rencana Kerja Kabupaten Pidie. Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPK. Rencana Kerja ini merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis, keduanya merupakan penjabaran dari undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan Menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tatacara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja.

Rencana kerja Majelis Adat Aceh pada tahun 2024 sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pgu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.01.01	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran	Lingkup MAA			DAU			
1.01.2.01.01	Kegiatan Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renja/Renstra		1 Dok	7.000.000			1 Dok	7.700.000
1.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan								
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		12 bln	756.593.867			12 bln	778.982.230
5.01.03.1.02.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Lakip		1 Dok	3.000.000			1 Dok	3.300.000
5.01.03.1.03	Kegiatan Administrasi Umum								
5.01.03.1.03.02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Efektifnya pelayanan instansi		12 bln	22.710.950			12 bln	14.784.000
5.01.03.1.03.05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Lancarnya operasional kantor		12 bln	55.270.000			12 bln	60.797.000
5.01.03.1.03.05	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya honorarium		12 bln	461.040.000			12 bln	507.144.000
5.01.03.1.03.07	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan kantor		12 bln	9.828.712			12 bln	10.811.583

5.01.03.1.03.08	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kantor		12 bln	6.940.000			12 bln	7.634.000
5.01.03.1.03.09	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya atk		12 bln	30.706.754			12 bln	33.777.429
5.01.03.1.03.10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12 bln	6.196.002			12 bln	6.815.602
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Adanya penerangan tempat kerja		12 bln	4.300.000			12 bln	4.730.000
5.01.03.1.03.12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya peralatan/perlengkapan Kantor		12 bln	8.000.000			12 bln	8.800.000
5.01.03.1.03.16	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan/minuman		12 bln	35.665.000			12 bln	39.231.500
5.01.03.1.03.17	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar/dalam daerah	Terlaksananya rapat konsultasi keluar/dalam Daerah		12 bln	220,384.000			12 bln	242.422.400
5.01.03.1.04	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Lingkup MAA						
5.01.03.104.01	Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Terpenuhinya pakaian aparatur		14 psg	9.100.000			14 Psg	10.010.000
1.1.8.2	Program Penyelenggaraan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie		Lingkup Kab. Pidie						
	Kegiatan Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh								
1.01.08.2.01	Serap Aspirasi Masyarakat (Meudrah) Wilayah Kabupaten Pidie (Barat, Utara, Selatan)	Terlaksananya Pembekalan kepada masyarakat dalam pengembangan Pendidikan.		5 Keg	500.000.000			5 Keg	550.000.000
1.01.08.2.01	Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas MAA	Terlaksananya Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas MAA		1 Keg	85.000.000			1 Keg	93.500.000
1.1.8	Penyelenggaraan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pidie		Lingkup Kab.						

			Pidie						
1.01.08.2.04.02	Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan Kepada dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan	Terlaksananya Kegiatan Penilaian dan Penghargaan Kinerja Komite sekolah dan tenaga Kependidikan		3 Keg	300.000.000			3 Keg	330.000.000
1.1.8.1.2	Penyelenggaraan Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pendidikan Kabupaten Pidie		Lingkup Kab. Pidie						
1.01.08.2.04.05	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Dayah Untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Ke Sekolah Sekolah, terlaksananya Pembinaan Komite Sekolah dan Kajian Kurikulum PAUD/TK dan RA.		6 Keg	600.000.000			6 Keg	660.000.000

BAB V PENUTUP

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rencana Kinerja (Renja) Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie Tahun 2024 merupakan Dokumen Rencana Kinerja yang diselaraskan dengan Perencanaan Strategis Majelis Adat Aceh Pidie dalam rangka pengajuan kebutuhan program, kegiatan dan pengalokasian anggaran Tahun 2024.

Penyusunan rencana kinerja tahunan Majelis Adat Aceh Pidie disusun berdasarkan indentifikasi permasalahan yang perlu ditindaklanjuti sesuai tugas dan fungsi Majelis Adat Aceh Pidie.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat untuk dapat dipedomani dan dipergunakan seperlunya.

Sigli, Juli 2023
KEPALA SEKRETARIAT
MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN PIDIE

BUKHARI, S.Pd, M.PD
PEMBINA Tk.I
NIP. 19661231 199305 1 002

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAERAH
PADA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH						2.455.174.736,00						2.457.674.736,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.455.174.736,00							2.457.674.736,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						2.455.174.736,00							2.457.674.736,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran</i>	-			95 %	2.179.674.736,00						-	2.179.674.736,00	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>JUMLAH DOKUMEN OPERASIONAL KANTOR</i>	-			95 %	3.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing 2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur	-	3.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pidie, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing 2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur		3.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	920.958.938,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing 2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur	-	920.958.938,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				9 Orang/bulan	920.958.938,00	Kab. Pidie, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing 2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur		920.958.938,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.255.715.798,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Transparan dan Akuntabel serta penin gkatan pela ksanaan syariat Islam	Aparatur	-	1.255.715.798,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				6 Laporan	1.255.715.798,00	Kab. Pidie, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Transparan dan Akuntabel serta penin gkatan pela ksanaan syariat Islam	Aparatur		1.255.715.798,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
2.	2.22.07	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	<i>Persentase Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat</i>	10 %			10 %	275.500.000,00						10 %	278.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.07.7.01	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	JUMLAH DOKUMEN PELESTARIAN DAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT	10 %			10 %	275.500.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan kemandirian pangan Untuk Mengatasi Dampak Sosial Pandemi Covid 19	Aparatur	10 %	278.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.07.7.01.0001	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional														
			Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional				1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Pidie, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan kemandirian pangan Untuk Mengatasi Dampak Sosial Pandemi Covid 19	Aparatur		82.500.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.07.7.01.0002	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga Meudadab dan Adat Perkawinan yang Dibina</i>				40 Keluarga	92.500.000,00	Kab. Pidie, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Meningkatk an Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing 1. Peningka tan Pertum buhan Ekonomi dan kemand irian pangan Untuk Mengatasi Dampak Sosial Pandemi Covid 19	Aparatur		92.500.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
J U M L A H								2.455.174.736,00							2.457.674.736,00	

**TABEL TC-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RPKP TAHUN 2024
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN PIDIE**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH						2.455.174.736,00							2.457.674.736,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.455.174.736,00							2.457.674.736,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						2.455.174.736,00							2.457.674.736,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.179.674.736,00						-	2.179.674.736,00	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.000.000,00			-	-	-	-	3.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pidie, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	920.958.938,00			-	-	-	-	920.958.938,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				9 Orang/bulan	920.958.938,00	Kab. Pidie, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		920.958.938,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.255.715.798,00			-	-	-	-	1.255.715.798,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				6 Laporan	1.255.715.798,00	Kab. Pidie, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.255.715.798,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
2.	2.22.07	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	-	-			-	275.500.000,00						-	278.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.07.7.01	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	-	-			-	275.500.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan kemandirian pangan Untuk Mengatasi Dampak Sosial Pandemi Covid 19	-	-	278.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.07.7.01.01	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional														
			<i>Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional</i>				1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Pidie, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan kemandirian pangan Untuk Mengatasi Dampak Sosial Pandemi Covid 19	-		82.500.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.07.7.01.02	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi														
			<i>Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi</i>				1 Lembaga	60.500.000,00	Kab. Pidie, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan kemandirian pangan Untuk Mengatasi Dampak Sosial Pandemi Covid 19	-		60.500.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.07.7.01.03	Sosialisasi Adat Istiadat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			-				-	42.500.000,00	Kab. Pidie, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah & Keisti mewaan Aceh 1. Peningka tan Pertum bahan Ekonomi dan kema n dirian pangan Untuk Mengatasi Dampak Sosial Pandemi Covid 19	-		42.500.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2.22.07.7.01.04	Pembinaan Keluarga Meudadab dan Adat Perkawinan															
			<i>Jumlah Keluarga Meudadab dan Adat Perkawinan yang Dibina</i>				40 Keluarga	92.500.000,00	Kab. Pidie, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah & Keisti mewaan Aceh 1. Peningka tan Pertum bahan Ekonomi dan kema n dirian pangan Untuk Mengatasi Dampak Sosial Pandemi Covid 19	-		92.500.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
		J U M L A H							2.455.174.736,00							2.457.674.736,00	